

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sampah menurut UU No. 18 Tahun 2008 memiliki arti sebagai bahan yang tersisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan juga hasil alamiah berbentuk padat. Kota Semarang bisa dikatakan menjadi bagian kota besar di Indonesia dengan kepadatan penduduk tinggi, menghasilkan sampah yang cukup banyak pula. Pertambahan penduduk yang signifikan yang dialami oleh suatu wilayah dapat memberikan pengaruh yang cukup kompleks. Meningkatnya volume sampah yang dihasilkan menjadi salah satu pengaruh buruknya. Pertambahan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Timbulan sampah yang di hasilkan ditentukan pula dengan bagaimana masyarakat itu sendiri dalam mengelola sampah yang dihasilkan. Pengelolaan sampah menjadi hal penting untuk dilaksanakan tiap-tiap daerah tidak terkecuali Kota Semarang. Pengelolaan sampah menjadi sorotan yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Meningkatnya volume sampah jika tidak ada keserasian dengan sistem pengelolaan yang baik maka akan menimbulkan persoalan yang lainnya. Pengelolaan sampah dapat dimaknai dengan penyusunan aturan mengenai mengendalikan timbulan sampah, penimbunan, proses pemindahan, pengangkutan dan pengelolaan sampah. Berlakunya undang-undang mengenai pengolahan sampah dapat ditelaah bahwa di dalamnya terdapat substansi penting. Substansi penting tersebut dapat disimpulkan mengenai peran pemerintah daerah yang

diwajibkan mengubah sitematika dari sampah yang dibuang menjadi sampah yang terolah. Sampah yang sebelumnya hanya diangkut dan dibuang, diwajibkan untuk adanya pengelolaan sampah terlebih dahulu. Tercatat produksi sampah Kota Semarang mencapai berton-ton untuk setiap harinya, berikut tabel rata-rata Kota Semarang dalam menghasilkan sampah.

Tabel 1.1. Produksi Sampah Kota Semarang

Tahun	Produksi Sampah (Ton)
2015	1249
2016	1270
2017	1200
2018	1400
2019	1200

Sumber : Dokumen DLH Kota Semarang 2017 & tribunnews.com

Produksi sampah Kota Semarang setiap harinya kurang lebih adalah 1200 ton, dengan jumlah sampah dalam satu tahunnya mencapai 430.000 ton. Dapat dibayangkan bagaimana keadaan tempat pembuangan sampah dengan volume sampah yang sedemikian banyaknya. Pada tahun 2018 tercatat bahwa produksi sampah setiap harinya mencapai 1400 ton. Tahun 2018 rata-rata produksi sampah merupakan angka tertinggi dari tahun sebelumnya. Pengolahan sampah menjadi salah satu hal yang penting mengingat dampaknya yang begitu luas. Pemerintah Kota Semarang membentuk peraturan daerah tentang pengelolaan sampah sebagai pelaksanaan undang-undang yang disusun oleh negara yaitu Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Semarang. Dengan landasan peraturan tersebut dapat dijadikan acuan Kota Semarang dalam pengelolaan sampah. Peraturan Daerah tersebut menyebutkan tugas pemerintah daerah dalam pengelolaan, tugas-tugas yang disebutkan di antaranya yaitu :

1. Menaikkan dan menumbuhkembangkan kesadaran dalam pengelolaan sampah kepada masyarakat;
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi mengenai penurunan dan juga penindakan terhadap sampah;
3. Memberikan fasilitas, mengembangkan dan melakukan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
4. Melakukan pengelolaan sampah dan juga memberikan fasilitas sarana prasarana dalam pengelolaan sampah;
5. Memberikan fasilitas serta melaksanakan peningkatan manfaat dari hasil pengelolaan sampah;
6. Menyediakan pelaksanaan teknologi untuk mengurangi dan menangani sampah yang telah berkembang di masyarakat;
7. Melaksanakan penyerasian antara semua pihak yaitu antar SKPD, swasta dan juga masyarakat agar menjadi satu kesatuan yang terpadu.

Pengelolaan sampah dengan konsep 3R sudah diterapkan oleh pemerintah. Upaya Pemerintah Kota Semarang tersebut kenyataannya belum sanggup memerangi permasalahan sampah. Sedangkan pada kenyataannya timbulan sampah yang dihasilkan kian bertambah untuk setiap harinya. Secara teknis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang mengatasi persoalan sampah dengan melakukan pengambilan, penampungan di Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dan membawanya ke TPA. Alur pengerjaan yang demikian, akan mengakibatkan kendala salah satunya tidak tercukupinya tempat penampungan dan berbagai persoalan lain yang dapat di alami..

Upaya dalam mencegah TPA Jatibarang mengalami kelebihan muatan tersebut, Pemerintah Kota Semarang melalui DLH menggunakan sistem pengelolaan sampah terpadu melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang berada di wilayah kecamatan. Mengurangi volume timbulan sampah, mengendalikan penggunaan lahan yang semakin terbatas, menghemat biaya, meningkatkan kesadaran dan lemandirian masyarakat dengan berperan aktif memperetahankan kebersihan lingkungan merupakan tujuan dari pengelolaan sampah terpadu..

Penanganan persoalan sampah ini ditindak lanjuti dengan saksama oleh pemerintah, salah satunya dengan program kerja sama dengan pihak ketiga. Kerjasama tersebut adalah kerjasama dengan PT. Narpati Agung Raya Persada. Dengan dasar surat perjanjian mengenai kerjasama dalam memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk organik. Banyaknya sampah yang akan terproses pada tahap 1 (tahun 1-5) sebanyak 250 ton sampah organik setiap harinya untuk kemudian diolah menjadi pupuk organik. Lima tahun berikutnya dilakukan peningkatan kapasitas yang disertai nilai kontribusi yang diserahkan kepada pemerintah. Bila hal tersebut berjalan dengan semestinya, diharapkan beban TPA dapat berkurang, sehingga masa hidup TPA bisa lebih panjang. Jangka waktu kerjasama yang terjalin sesuai dengan perjanjian adalah selama 25 tahun.

Pemerintah Kota Semarang juga melaksanakan inovasi pengolahan sampah di TPA Jatibarang. Sampah-sampah dikelola dari sampah organik yang menghasilkan gas metan untuk selanjutnya dijadikan energi listrik yang bekerjasama dengan PLN. Pihak ketiga akan memasarkan listrik yang dihasilkan

kepada PLN. Sebelum program ini di jalankan, gas metan yang dihasilkan disalurkan kepada masyarakat.

UU No. 18 Tahun 2008 menekankan bahwa semua pihak wajib memprioritaskan pengurangan sampah dengan melakukan pelaksanaan 3R yaitu *reuse* (menggunakan kembali), *recycle* (mendaur ulang) dan *reduce* (mengurangi). Seirama dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 yang menyebutkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga harus dilakukan oleh setiap individu dengan kewajiban menurunkan dan melakukan pengurangan sampah dengan memperhatikan kebaikan lingkungan

Partisipasi dari berbagai pihak dalam mendukung program pengolahan sampah ini juga sangat diperlukan, mengingat sampah yang ada bersumber dari kehidupan manusia. Sistem penanganan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri bertujuan untuk mengurangi sampah dan juga merombak sampah membentuk sesuatu yang lebih bermanfaat merupakan arti dari pengolahan sampah yang berbasis masyarakat. Peningkatan kemandirian serta perbaikan pola pikir masyarakat akan pentingnya dalam menjaga dan mempertahankan kebersihan sangat diperlukan. Masyarakat di tingkat rumah tangga secara umum melakukan pengelolaan sampah yang dikategorikan dalam tiga tahap yaitu, pewadahan, pemilahan, dan pendaurulangan.

Pengolahan sampah di Kota Semarang perlu mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah membuat rancangan-rancangan yang diupayakan sebagai penanggulangan permasalahan persampahan. Hal tersebut

tentunya harus diiringi dengan partisipasi masyarakat dalam menangani permasalahan sampah ini, sehingga hasilnya akan lebih maksimal. Partisipasi dari semua kalangan yang terlibat sangatlah diperlukan. Mengingat permasalahan mengenai sampah merupakan masalah yang cukup serius. Harapan tinggi akan tercapainya target dan tujuan dari setiap program dapat terwujud dengan baik. Tercapainya tujuan serta target menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan. Keberhasilan dalam penanganan lingkungan diharapkan tersebut Dengan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan diharapkan kebersihan dan penanganan sampah dapat terwujud.

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana efektivitas pengelolaan sampah di TPA Jatibarang dalam mewujudkan Kota Semarang bersih?
- 2) Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang?

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.3.1. Tujuan

- 1) Untuk menganalisis seberapa efektif pengelolaan sampah di TPA Jatibarang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Semarang.
- 2) Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan faktor-faktor yang menghambat dalam pengelolaan sampah.

1.3.2. Manfaat

Manfaat yang didapat adalah sebagai kajian terhadap pengelolaan sampah di Kota Semarang dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di Kota Semarang.

1.4. Kajian Teori

1.4.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Pengarang, Edisi Terbit, Judul.	Masalah Penelitian	Hasil
1	2	3	4
1.	Swanlayli Octrinda Sihombing, 2015, Efektivitas Pengolahan Sampah Rumah Tangga di Kota Medan (Studi Kasus di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai).	Sampah yang dihasilkan di kota-kota besar volumenya cukup besar.	Belum efektifnya program pengelolaan sampah rumah tangga yang dilaksanakan di Kelurahan Binjai, hal tersebut dikarenakan masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam keikutsertanya untuk membangun lingkungan tempat tinggalnya.

1	2	3	4
2.	Nindy Hapsari, 2014, Evaluasi Program Pengolahan Sampah Berskala Keluarga di Kelurahan Tembalang.	Perpindahan aktivitas perkuliahan ke Tembalang tahun 2010.	Program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan awal.
3.	Sri Wahyono, 2015, Analisis Efektivitas Konsep Pengolahan Sampah Organik melalui Teknologi Komposting.	Menguji efektivitas konsep pengelolaan sampah organik melalui analisis aliran material.	Konsep pengelolaan sampah, terutama desentralisasi alternative merupakan alternative pengelolaan sampah yang efektif.
4.	Anih Sri Suryani, 2014, peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang).	Membuktikan efektivitas dari pengelolaan sampah melalui bank sampah di kota Malang dari sudut pandang aspek pengelolaan sampah.	Salah satu yang dapat dijadikan solusi bagi pemerintah dan masyarakat adalah program pengelolaan bank sampah yang dapat dilakukan secara mandiri.

Berdasarkan tabel di atas yang telah menjelaskan poin-poin penelitian sebelumnya, penelitian ini mengambil focus mengenai efektivitas pengolahan sampah. Topik yang akan dibahas hampir menyerupai yaitu mengenai efektifitas. Penelitian ini mengambil objek yang berbeda dari penelitian-penelitian

terdahulu. Objek yang telah ditentukan oleh peneliti adalah pengolahan sampah di Kota Semarang. Peneliti ingin melihat seberapa efektif pengolahan sampah di Kota Semarang, peneliti ingin melihat seberapa efektif pengolahan sampah di Kota Semarang, penelitian terdahulu tersebut sebagai gambaran dan menunjukkan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini.

1.4.2. Administrasi Publik

Suatu gejala sosial yang merupakan bentuk tertentu di dalam masyarakat sering disebut dengan administrasi. Eksistensi dari administrasi sendiri berhubungan dengan organisasi, artinya didalam suatu organisasi terdapat administrasi itu sendiri. Prinsipnya administrasi memiliki pengertian kerjasama yang dilakukan oleh banyak orang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Dunsire memberikan pendapatnya mengenai administrasi (dalam Keban, 2008 : 2) pekerjaan perseorangan maupun kelompok dalam menciptakan jasa dan barang dalam sektor publik dan sebagai area bidang kerja akademik dan teoritik dengan melakukan pengarahannya, pemerintahan, kegiatan pelaksanaan, menciptakan prinsip-prinsip, melaksanakan kegiatan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan merupakan administrasi. Trecker (dalam Keban, 2008 : 2) memberikan pendapatnya bahwa administrasi adalah proses yang dilaksanakan secara terus menerus berubah dan juga berkelanjutan, yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan pemanfaatan sumberdaya manusia dan juga alat-alat didalamnya dengan koordinasi dan kerjasama.

Administrasi memiliki tugas-tugas antara lain meliputi kegiatan mengidentifikasi kebutuhan, mendefinisikan dan mendefinisikan kembali serta menginterpretasi dan menerapkan tujuan organisasi sebagai paksaan program dan pelayanan, menyelamatkan sumberdaya keuangan, fasilitas, staff, dan bentuk-bentuk dorongan lain. Tugas lain dari administrasi adalah mengembangkan program dan pelayanan, mengembangkan struktur organisasi serta prosedur organisasinya, pembuatan kebijakan dilakukan dengan kepemimpinan, melakukan evaluasi kepegawaian dan program secara berkelanjutan, dan membuat perencanaan dan juga melakukan penelitian.

Kata publik sendiri berasal dari bahas Inggris yaitu *public* yang memiliki arti masyarakat, negara atau umum. Dapat pula diartikan sebagai beberapa orang yang mempunyai persamaan dalam berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang dirasakan baik dan benar sesuai dengan nilai dan norma yang dimiliki.. Publik sendiri tidak serta merta didefinisikan sebagai warga negara, penduduk, rakyat atau masyarakat, karena masing-masing memiliki makna yang berbeda.

Pendefinisian dari administrasipublik cukup banyak disampaikan oleh para ahli. Administrasi publik menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2008 : 3) adalah proses-proses dimana pegawai publik dan sumberdaya diorganisasi dan dikoordinasi untuk merumuskan, melaksanakannya, dan mengorganisasikan ketentuan-ketentuan dalam kebijakan publik. Keduanya juga menyebutkan bahwa ilmu dan seni merupakan bagian administrasi yang bertujuan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan.

Administrasi publik memiliki tujuan untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang dialami oleh publik yang harus diperbaiki dan di sempurnakan terutama dalam suatu organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan. Terdapat persepsi lain mengenai administrasi publik, Mc Curdy (dalam Keban, 2008 :3) menyampaikan pendapatnya mengenai administrasi publik yang dilihat sebagai proses politik, administrasi publik dijadikan salah satu cara dalam memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang memiliki prinsip untuk melaksanakan berbagai fungsi negara. Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (dalam Syaffie, 2010 : 23) menyampaikan pendefinisianya terhadap administrasi publik yaitu :

1. Administrasi publik meliputi pelaksanaan dari kebijakan pemerintah yang telah diputuskan oleh lembaga perwakilan.
2. Administrasi publik dapat didefinisikan penyelarasan usaha tiap orang dan juga kelompok untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintahan.
3. Secara umum administrasi publik merupakan proses yang berkaitan dengan kegiatan implementasi kebijakan pemerintah, pengendali kebijakan, dan cara-cara yang tidak terkira jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Disiplin ilmu dari ilmu administrasi publik memiliki obyek yaitu pelayanan publik, sehingga kajian utama dari administrasi public adalah berbagai organisasi publik. Gerald E. Caiden (dalam Syaffie, 2010 : 26) dalam bukunya *Public Administration* memberikan garis besar bahwa terdapat tiga aspek dalam

penentuan suatu organisasi tergolong pemerintahan atau tidak, ketiga aspek tersebut adalah dengan melihat pembentukannya apakah dengan peraturan pemerintah atau tidak, para pekerja disebut pegawai negeri, dan sumber pembiayaan berasal dari masyarakat. Terdapat beberapa hal dari administrasi publik yang dikhususkan antara lain tidak dapat dihindari, sulit untuk diukur sehingga harapan terhadap administrasi publik tinggi, menginginkan kepatuhan, memiliki keutamaan, adanya puncak pimpinan politik.

Paradigma merupakan suatu corak berpikir seseorang atau sekelompok orang. Ilmu pengetahuan sendiri memiliki sifat yang relatif, salah satu persyaratan dari ilmu pengetahuan sendiri harus diterima secara universal, namun dalam keberjalanannya tetap memiliki perubahan. Ilmu pengetahuan sendiri memang sangat terbatas ruang lingkup atau kapasitasnya, dengan kebenaran dari ilmu yang abstrak tetapi dalam kehidupan ini tentunya sangat diperlukan. Thomas S. Kuhn (dalam Syaffie, 2010 : 26) mengungkapkan bahwa paradigma adalah suatu sudut pandang, nilai-nilai, cara-cara, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah, yang diikuti suatu masyarakat pada suatu masa tertentu. Perkembangan paradigma administrasi publik terdapat tiga paradigma administrasi publik (dalam Alamsyah, 2016 : 174), yaitu :

1. *New Public Administration* (NPA)

Sudut pandang ini lahir pertama kali di Amerika Serikat, diawali dengan adanya beberapa krisis. Pertama, pemerintah tidak mampu dalam mengatasi beberapa permasalahan dalam masyarakat seperti kejahatan, penggunaan obat bius,

kejahatan, kemiskinan, banyaknya tuna wisma, buta huruf, sampah yang mengandung racun, melonjaknya biaya perawatan medis. Selanjutnya adalah besarnya birokrasi pemerintah dan terpusatnya serta layanan yang terlalu kaku, tidak menyesuaikan dengan berbagai tantangan yang ada di masyarakat dan juga cepatnya perubahan informasi pada masa industri yang menyebabkan kesan lambat dalam penanganan permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Ketiga, sistem birokrasi yang terlalu kuno menghambat adanya kreativitas dan melonggarkan tingkat produktivitas pegawai. Keempat, sebagian besar dari pemerintah tidak memahami siapa publik atau pelanggan sebenarnya yang harus dilayani dan terpenuhi kebutuhannya.

2. New Public Manajemen (NPM)

New Publik Management bertujuan untuk meningkatkan kinerja administrasi publik melalui penggunaan konsep-konsep yang diambil dari sektor swasta. Pokok-pokok pikiran NPM yang diuraikan disini menggunakan pokok pikiran dalam 10 prinsip pemerintah wirausaha. Penerapan NPM tentunya memiliki manfaat yang diperoleh yang pertama birokrasi yang dibangun memperhatikan bagaimana mekanisme pasar, kedua lebih terdorongnya kompetisi dalam pencapaian hasil, ketiga harus lebih responsive dengan kebutuhan-kebutuhan pelanggan, keempat tidak menjalankan sendiri melainkan harus lebih mengarahkan, kelima harus melaksanakan kegiatan pembatasan atau penghapusan peraturan, terakhir memberdayakan pelaksana agar lebih efektif dalam melakukan tugasnya. Selain itu NPM juga melaksanakan budaya organisasi

yang lebih inovatif, berjiwa usaha, fleksibel dan pencapaian hasil ketimbang budaya yang taat asas, hanya berorientasi pada proses dan input.

3. *New Public Service* (NPS)

Setelah menerapkan NPM di dalam sektor publik, dirasakan masih terdapat banyak aspek yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pelayanan publik. Maka dari itu, terdapat beberapa kritikan yang diberikan terhadap pelaksanaan NPM. Perspektif *new public service* mengawali pandangannya terhadap warga negara yang diakui bahwa posisinya penting bagi pemerintahan yang demokratis. Warga negara dilihat dengan melibatkan adanya nilai, kepedulian terhadap orang lain dan kepercayaan tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan pribadi. Warga negara sendiri ditempatkan sebagai pemilik dari pemerintahan itu sendiri (*owners of government*) dan dapat melaksanakan bersama-sama pencapaian suatu hal untuk menjadi lebih baik lagi. Kepentingan publik dipandang memiliki keterlibatan dan juga partisipasinya dalam mencari nilai dan kepentingan bersama tidak lagi dipandang sebagai kumpulan dari kepentingan pribadi. Pada perspektif ini administrator publik diharapkan melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan memiliki tugas untuk melayani masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya para administrator publik harus memahami adanya beberapa kompleks tanggung jawab, akuntabilitas dan etika dalam suatu sistem birokrasi publik.

Cakupan atau ruang lingkup administrasi publik sangat beragam tergantung dari perkembangan kebutuhan atau pergerakan permasalahan yang

dihadapi masyarakat. Nicholas Henry (dalam Keban, 2008 : 8) memberikan beberapa cakupan ruang lingkup yang dapat dilihat dari unsur-unsur berikut :

1. Organisasi publik, merupakan suatu wadah yang mengatur berbagai sistem. Dengan prinsip didalamnya seperti bagaimana gaya organisasi dan juga perilaku organisasi.
2. Manajemen publik, berkaitan dengan ilmu manajemen. Menerapkan berbagai fungsi manajemen dalam melaksanakan tugasnya. Bagaimana mengatur sumberdaya manusianya, melaksanakan evaluasi pada program, melihat anggaran yang tersedia beserta pemanfaatannya sehingga efisien serta aspek-aspek lain yang mengikuti.
3. Implementasi, pelaksanaan akan semua rencana yang telah dirumuskan dengan pendekatan manajemen publik. Dengan menyangkutkan semua sektor yang terkait dengan pemerintahan.

Administrasi publik muncul bertujuan atas pemberian pelayanan publik dan masyarakat dapat merasakan manfaat tersebut setelah adanya peningkatan profesionalitas dari pemerintah, memahami dan melaksanakan teknik efisien dan efektivitas. Hal tersebut akan lebih terasa lagi manfaatnya ketika pemerintah dapat menyadarkan masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam penerimaan dan menjalankan tanggung jawab administrasi. Administrasi publik memiliki peran dalam memberikan ataupun menciptakan demokrasi melalui pelayanan yang dilaksanakan. Rondinelli (dalam Keban, 2008 : 16) mengatakan pemerintah memiliki peran yang harus diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat agar mencapai *democratic governance*. Pelayanan kepada masyarakat wajib dilakukan secara efektif melalui inovasi, prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik, penguatan lembaga-lembaga publik, memanfaatkan teknologi, desentralisasi dalam pelayanan, adanya partisipasi pengembangan kapasitas, kemitraan dari ranah publik maupun swasta dan adanya pemberdayaan.

Kegiatan dalam administrasi publik ini merupakan pekerjaan pemerintah dengan banyak tanggung jawab dan memiliki banyak jenis serta bervariasi hal ini bersangkutan dengan pelayanan yang diberikandalam ssetiap bidang kehidupan. Memfokuskan kegiatan administrasi pada sudut pandang manajemen dalam melaksanakan kebijakannya. Administrasi publik kiranya berhubungan dengan penanganan pelayanan publik derti medikan kebutuhannya. Kegiatan administrasi publik bertujuan untuk mencukupi setiap kepentingan dan kebutuhan publik. Pemerintah sebagai perwakilan dari masyarakat hendaknya selalu memberikan yang terbaik dalam setiap kegiatannya. Partisipasi dari masyarakat sendiri juga harus diimbangi mengingat partisipasi sangat berpengaruh dalam setiap proses pelayanan publik. Keharmonisan semua komponen dalam administrasi publik tentunya berpengaruh dalam keberjalanan administrasi publik itu sendiri.

1.4.3. Manajemen

Ilmu manajemen dikemukakan dalam berbagai pandangan pemahaman diantaranya aliran yang modern, aliran klasik, aliran hubungan manusiawi dan aliran manajemen modern. Aliran pemahaman klasik atau sering disebut juga dengan pendekatan proses dan produksi merupakan pemahaman awal yang berkembang.

Setelahnya manajemen melihat sisi sumberdaya manusia yang ada didalam organisasi atau disebut pemahaman hubungan manusiawi. manajemen sebagai ilmu pengetahuan memiliki sifat yang umum, manajemen juga menggunakan rancangan ilmu pengetahuan yang tersistem, memiliki cakupan konsep serta prinsip dalam setiap situasi manajerial. Ilmu manajemen sendiri diperlukan oleh setiap organisasi, dengan manajemen yang baik tujuan akan lebih mudah dicapai. Terdapat beberapa alasan yang dikatakan utama penggunaan manajemen dibutuhkan bagi organisasi yaitu :

1. Dipakai dalam pencapaian tujuan. Pelaksanaan manajemen diperlukan dalam pencapaian tujuan baik itu organisasi maupun pribadi. Manajemen yang baik dapat mendorong tercapainya tujuan lebih maksimal.
2. Menjaga seimbangannya di antara berbagai tujuan yang tidak sejalan atau berlawanan. Menjaga keselarasan antara segala sesuatu yang bertentangan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan didalam organisasi sebagai contoh antara masyarakat dengan pemerintah.
3. Sebagai pencapaian efektifitas dan efisiensi, pengukuran kinerja dalam organisasi dapat diukur dengan berbagai cara, salah satunya adalah pengukuran seberapa efektif dan efisien kinerja tersebut.

Mary Parker Follet (dalam Handoko, 2015 : 8) memberikan pandangannya mengenai manajemen, dirinya menggap seni dalam penyelesaian suatu pekerjaan yang dilakukan buakn oleh dirinya sendiri merupakan manajemen. Memiliki arti bahwa para manajer dalam pencapaian tujuan

organisasi yang telah ditentukan dengan mengatur para karyawan dan melaksanakantugas bukan oleh dirinya sendiri. Manajemen memiliki pengertian yang cukup luas sehingga definisi-definisi yang ada tidak digunakan secara sama persis antara setiap orang.

Menurut Stoner (dalam Handoko, 2015 : 8) manajemen dikatakan sebagai suatu proses yang didalamnya terdapat unsur-unsur penting yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan juga pengawasan serta usaha dari para anggota dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada dalam pencapaian tujuan. Benang merah yang dapat ditarik adalah sudah menggunakan kata proses bukan lagi seni. Kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan organisasi merupakan pengertian dari manajemen sebagai seni. Cara yang sistematis dalam melakukan pekerjaan adalah proses itu sendiri. Semua manajer harus melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan tanpa mempedulikan ketrampilan ataupun kecakapan yang khusus dalam pencapaian tujuan. Rangkaian kegiatan yang dimaksud adalah adanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan tentunya pengawasan. Keterlibatan tujuan-tujuan dalam proses manajemen, manajer dalam organisasi harus berupaya meraih hasil yang lebih jelas dan khusus. Hasil yang hendak dicapai tentunya berbeda pada setiap organisasi. Dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian tujuan dibutuhkan manajemen dengan melibatkan proses yang sistematis dalam pencapaian tujuan yang berbeda dari masing-masing organisasi.

Manajemen dapat dimaknakan sebagai pekerjaan yang dilaksanakan bersama dengan orang lain untuk menetapkan, menafsirkan dan meraih tujuan yang

telah ditetapkan sebelumnya dengan melaksanakan fungsi manajemen. Ricky W. Griffin (dalam Mujahida, 2018 : 11) juga mengungkapkan pendapatnya mengenai manajemen dimana dikatakan bahwa manajemen merupakan proses dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan darai sumberdaya yang ada dalam pencapaian sasaran ataupun tujuan secara efeisien dan efektif. Terdapat empat fungsi utama dalam manajemen yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*)

Proses dalam merangkai berbagai kebutuhan dalam suatu organisasi seperti merumuskan tujuan yang hendak dicapai, merangkai cara dalam melaksanakan tujuan, dan pengembangan rencana dari tindakan yang hendak dilaksanakan. Proses ini merupakan prose yang dapat dikatakan merupakan proses terpenting, hal tersebut dikarenakan perencanaan merupakan proses paling awal dalam suatu rangkaian proses manajemen. Tanpa adanya perencanaan maka fungsi-fungsi lain tidak dapat berjalan dengan semestinya. Beberapa kegiatan yang dilakukan pada proses ini antara lain menetapkan target dan tujuan yang hendak dicapai, membuat rencana-rencana dalam pencapaian yang diharapkan, menentukan sumberdaya yang nantinya diperlukan, dan menetapkan indikator atau standar keberhasilan. Strategi diperlukan untuk mempermudah dalam melaksanakan apa yang relah dirumuskan sebelumnya. Dengan perencanaan yang baik, organisasi memungkinkan memiliki kelebihan lain yaitu :

- a. Mendapatkan sumberdaya yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan dan mengikat sumberdaya tersebut.

- b. Pelaksanaan kegiatan yang berkesinambungan dan dilakukan secara terus menerus dengan tata cara yang ditentukan yang dilaksanakan oleh anggota.
- c. Pengukuran dan monitoring dapat dilakukan pada setiap kemajuan ataupun kemunduran, sehingga dapat langsung ditindak lanjuti apabila hal tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Dilaksanakan setelah tahap perencanaan diselesaikan dan merupakan fungsi kedua dalam manajemen. Dapat diartikan sebagai suatu tindakan dalam mengatur berbagai aspek dalam organisasi. Pada tahapan ini pembagian pekerjaan terlihat dengan jelas dengan adanya struktur yang formal. Strategi yang telah dirumuskan sebelumnya diatur sedemikian rupa dalam struktur organisasi yang tepat, lingkungan organisasi yang memadai, dan memastikan semua yang terlibat dalam organisasi bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak kalah penting pengorganisasian juga memberikan kontribusi yang dapat melancarkan sasaran organisasi. Seluruh sumberdaya dipadupadankan sehingga dapat saling beriringan dan melengkapi satu sama lain sehingga tercipta keharmonisan didalam organisasi.

3. Pengarahan (*Actuating/Directing*)

Setelah perencanaan disusun dan diselesaikan dengan berbagai kebutuhan yang mengikutinya, yang selanjutnya adalah pengarahan. Pemberian instruksi kepada sumberdaya manusia yang terlibat dalam organisasi. Secara sederhana fungsi ini menggerakkan para karyawan atau anggota dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkan dan harus dijalankan tanpa pengecualian.

Kepemimpinan diterapkan pada fungsi ini dimana gaya, kualitas dan juga kekuasaan merupakan hal yang dasar. Selain itu juga harus melibatkan komunikasi yang baik serta adanya motivasi kerja sehingga kedisiplinan dapat diwujudkan. Penerapan dari proses kepemimpinan dan juga pendampingan terus dilakukan agar semua sesuai dengan yang diharapkan dan mencapai kinerja yang baik. Pemberian tugas yang jelas mengenai apa yang harus dikerjakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku juga penting untuk diperhatikan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Semua rangkaian yang ada hendaknya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh semua pihak yang terlibat agar tercapai semua tujuannya.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan fungsi selanjutnya harus dilaksanakan, melihat bagaimana kegiatan berjalan apakah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan dan ditargetkan sebelumnya, sehingga kegiatan yang tidak semestinya terjadi tidak terulang kembali. Dengan pengawasan fungsi-fungsi sebelumnya dapat terlihat apakah sudah sesuai dengan keadaan atau belum, untuk selanjutnya dapat dijadikan perbaikan-perbaikan. Terdapat Empat unsur dalam fungsi pengawasan antara lain :

- a. Penentuan standar pelaksanaan.
- b. Penetapan indikator sebagai alat ukur pelaksanaan.

- c. Membandingkan antara apa yang dilaksanakan dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat diukur.
- d. Pengambilan tindakan lanjutan yang diperlukan apabila pelaksanaannya tidak sesuai.

Proses pengawasan dilakukan guna memastikan apakah seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dan diorganisasikan serta diterapkan sesuai dengan target yang diinginkan. Perubahan-perubahan tentunya terjadi dalam setiap lingkungan organisasi namun pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Evaluasi tercapainya keberhasilan dalam target sesuai dengan indikator merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam proses pengawasan. Tindakan mengoreksi dan memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang mungkin terjadi harus diupayakan dengan berbagai alternatif. Alternatif tersebut dilakukan agar kesalahan dapat diperbaiki dan berjalan sesuai dengan perumusan awal.

Manajemen adalah sebuah prosedur yang dilaksanakan dalam perwujudan suatu tujuan organisasi dengan beberapa kegiatan terangkai seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia serta sumber daya lainnya. Penerapan manajemen berdampak dapat menghasilkan efek atau manfaat yang baik bagi organisasi. Proses manajemen membantu dalam pembuatan strategi yang lebih baik. Diperlukan pemahaman proses sehingga tercapainya pemahaman dan komitmen dari apa yang direncanakan. Dilakukan untuk mengetahui ancaman eksternal maupun internal karena perubahan

lingkungan organisasi sehingga terbiasa untuk menyiapkan perencanaan yang lain jika terjadi hal yang tidak diinginkan.

1.4.4. Manajemen Perkotaan

1.4.4.1. Pengertian Kota

Kota (*city*) merupakan suatu wilayah yang mempunyai status administrasi sebagai suatu kota, yang diklasifikasikan berupa kota kecil, kota madya maupun kota metropolitan. Menurut Amos Rapoport (dalam Fahmi, 2009) pemukiman yang memiliki ukuran relative besar dengan penduduk yang padat dan juga permanen terdiri dari berbagai kalangan individu yang heterogen dari segi sosial disebut kota. Wilayah perkotaan (*Urbanized area*) merupakan daerah yang telah berkembang secara pesat dan lebih cepat menjadikannya sebagai daerah pusat pertumbuhan ekonomi dan industri serta pelayanan sosial (dalam Nurmadi, 2014 : 39). Menurut Prof. Bintoro (dalam Fawahid, 2016 :5) melihat kota dari segi geografisnya, kota merupakan jaringan kehidupan dengan tanda kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan memiliki strata ekonomi heterogen cenderung bercorak materialistis. Unsur-unsur alami maupun tidak alami dengan adanya pemusatan kependudukan yang cukup besar dan bersifat heterogen materialistic tersebut membentuk bentang budayanya. Menurut John Brickerhoff Jackson (dalam Fawahid, 2016 :5) kota merupakan suatu tempat tinggal manusia yang merupakan bentuk dari perencanaan dan perancangan dengan berbagai unsur pemenuhan seperti jalan, ruang terbuka hijau dan bangunan.

Gist N.P dan Halbert L.A (dalam Yunus, 2009 :7) mengklasifikasikan kelas kota berdasarkan fungsinya menjadi enam jenis, yaitu :

1. Kota berfungsi sebagai pusat industry

Kegiatan-kegiatan yang menonjol diantara kegiatan lainnya adalah kegiatan industry. Negara berkembang melakukan kegiatan industry berupa industry primer yang mempengaruhi kota-kota di dalamnya. Semakin maju industry saat ini, berakibat pada daerah hunian yang merupakan daerah yang benar-benar dihuni mengalami pengurangan lahan karena semakin luas daerah industri yang ada. permasalahan tersebut menjadi salah satu penyebab dari menurunnya kualitas dari kondisi lingkungan di kota besar.

2. Kota difungsikan sebagai pusat perdagangan

Setiap kota sebenarnya merupakan pusat perdagangan yang ditinjau dari kehidupan kotanya. Namun tidak semua kota perdagangan ditandai dengan kegiatan berdagang semata, melainkan kererlibatan dari aspek lainnya. Pada umumnya kota perdagangan yang memiliki skala besar merupakan kota pelabuhan, dikarenakan kota tersebut dapat melaksanakan kegiatan yang lebih besar dalam bidang perdagangan disbanding dengan kota yang tidak memiliki pelabuhan.

3. Fungsi kota sebagai pusat politik

Peranan kota yang dijadikan pusat pemerintahan negara akan berkembang menjadi kota politik. Hal tersebut dikarenakan kota dijadikan sebagai pusat pemerintahan baik itu antara daerah dengan pusat maupun pusat dengan

negara-negara lain. Dalam hal tersebut perwakilan negara lain akan didudukkan pada kota yang ditetapkan sebagai pusat pemerintahan negara.

4. Kota difungsikan untuk pusat kebudayaan

Berkaitan erat dengan kegiatan pendidikan, agama dan kebudayaan terkhususkan seni. Potensi kebudayaan terlihat lebih menonjol dibandingkan dengan fungsi lain yang ada di kota tersebut. Sehingga kota menjadi pusat kebudayaan yang menarik.

5. Kota difungsikan sebagai pusat rekreasi atau kesehatan

Kota yang memiliki kondisi tertentu yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk menikmati sesuatu yang ditawarkan oleh kota tersebut dapat menjadikannya sebagai kota yang memiliki fungsi sebagai tempat hiburan maupun kesehatan. Di dalam kota memiliki sesuatu yang dapat menarik minat orang luar untuk tujuan rekreasi maupun tujuan kesehatan.

6. Kota yang tidak memiliki fungsi tertentu yang dapat ditonjolkan

Merupakan kota yang tergolong baru atau kota kecil yang tidak memiliki fungsi yang spesifik dan menonjol pada pertumbuhannya. Fungsi dari kota belum berkembang sedemikian rupa sehingga tidak dapat diklasifikasikan secara spesifik.

Karakteristik suatu kota dapat disoroti dari berbagai segi. Taylor , Griffith (dalam Yunus, 2009 : 37) mengemukakan klasifikasi kota didasarkan pada kekhususan dari segi fungsinya, tahap pertumbuhan kota dapat digolongkan menjadi empat bagian yaitu :

1. Tahap Infantile (*The Infantile Stage*)

Pada tahapan ini derah pemukiman dengan perdangan belum terlihat dengan jelas pemisahan diantara keduanya. Bangunan yang ada belum teratur dan belum terlihat pemilahan antara kampong kaya dan miskin.

2. Tahap Juvenil (*The Juvenile Stage*)

Progress dari pengelompokan antara pertokoan di bagian wilayah tertentu mulai terlihat. Bagunan rumah mulai bermunculan dengan kondisi rumah lebih besar dn juga lebih baik di daerah pinggiran serta daerah pabrik.

3. Tahap Dewasa

Gejala pemisahan fungsi dan pengelompokan kembali dari ungsi-fungsi tersebut sudah terlihat dalam tahapan ini. Terlihat jelas perbedaan antara kelas permukiman yang baik dan kelas permukiman yang jelek.

4. Tahap Ketuaan (*The Senile Stage*)

Ditandai dengan terhentinya pertumbuhan yang diiringi dendgan beberapa distrik mengalami kemunduran dan kesejahteraan pada bidang ekonomi yang menurun biasanya kondisi tersebut dapat dilihat pada daerah industri.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang kawasan perkotaan adalah suatu tempat dengan kegiatan yang beragam serta kegiatan pertanian bukanlah yang utama dengan susunan pemfungsian kaawasan sebagai tempat bermukim, pemusatan dan pendistribusian pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan juga kegiatan ekonomi lainnya. Secara umum kota dapat diartikan sebagai wilayah yang didalamnya terdapat pemusatan penduduk yang cukup heterogen dan adanya

berbagai kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan pemerintahan. Dapat digambarkan lebih rinci lagi bahwa kota konsentrasi daerah pemukiman berpenduduk cukup besar dan kepadatannya relatif tinggi dimana kegiatan penduduk mayoritas merupakan kegiatan non pertanian, seperti perdagangan, jasas, industry baik di bidang transportasi, keuangan, pariwisata, industry dan kesehatan. Kota memiliki karakteristik-karakteristik tersendiri yang menggambarkan suatu wilayah dapat dikatakan menjadi suatu kota. Kota merupakan wilayah administratif yang memiliki penduduk cukup padat dan heterogen dengan batas-batas wilayah yang jelas. Perkotaan merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk lebih padat daripada daerah sekitarnya dikarenakan aktivitas dan pemusatan kegiatan penduduk.

Table 1.3. Pengertian Kota ditinjau dari Berbagai Aspek

Lingkup	Pengertian Kota
1	2
Fisik	Memiliki kondisi yang lebih padat dari pada daerah di sekitarnya padat dari segi bangunan.
Demografis	kepadatan dan jumlah yang tinggi konsistensinya dibandingkan dengan wilayah yang ada dsisekitarnya.
Sosial	Memiliki kolompok sosial yang lebih beragam dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan sosial masyarakat.
Geografis	Wilayah yang terbangun lebih padat disbanding dengan yang lainnya .
Statistik	Secara statistik ukuran jumlah penduduk dan besarnya telah sesuai dengan ukuran atau batasan dari kriteria suatu kota.
Ekonomi	Kegiatan yang dilakukan cukup beragam dengan usaha utama bukan berasal dari sektor pertanian melainkan sektor lain seperti pelayanan jasa, industry, perdaganagn, kantor dan masih banyak lagi.

1	2
Administrasi	secara administratif suatu wilayah memiliki batasan kewenangan antara pemerintah daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Sumber : Pengantar Perencanaan Perkotaan. Nia K. Pontoh : 2018

Kota merupakan wilayah pemukiman yang padat penduduk dengan berbagai macam kegiatan didalamnya. Penduduk yang homogen memberikan dampak yang cukup terlihat nyata, salah satunya pada lingkungan. Pemerintah pusat telah membuat program dengan tujuan untuk menguatkan pemerintah daerah kota dan kabupaten mewujudkan pemerintahan yang baik dalam bidang lingkungan hidup. Program tersebut adalah program Adipura, merupakan penghargaan untuk kota/kabupaten di Indonesia yang dapat melaksanakan pengelolaan lingkungan dengan baik dan mencapai keberhasilan, program ini mendukung kota-kota di Indonesia menjadi kota teduh dan bersih. Terdapat dua indeks penting dalam penentuan kriteria Adipura yaitu :

- a) Indikator kondisi fisik dilihat dari aspek keteduhan dan kebersihan lingkungan perkotaan.
- b) Indikator pengelolaan lingkungan non fisik, yang meliputi lembaga, manajemen, dan tanggapan terhadap permasalahan.

Adapula beberapa kriteria lingkungan bersih dan sehat antara lain :

1. Udara

Kualitas udara menjadi hal pertama yang diperhatikan dalam ciri-ciri lingkungan sehat. Udara yang terasa segar, menyejukkan dan bersih menunjukkan bahwa didaerah lingkungan tersebut sehat.

2. Pembuangan sampah

Tempat pembuangan sampah merupakan hal yang harus diperhatikan. Pengadaan ini bertujuan agar sampah terkumpul dan tidak mengotori wilayah tersebut dan menciptakan kebersihan. Tempat yang disediakan hendaknya dapat menampung sampah yang berbeda yaitu sampah organik dan anorganis secara terpisah.

3. Tersedianya pengelolaan sampah

Tempat pembuangan sampah yang tersedia tentunya tidak akan cukup. Sampah terus berdatangan sehingga perlu adanya pengelolaan sampah yang baik sehingga dapat menjaga kebersihan.

4. Adanya pengelompokan sampah

Kebersihan lingkungan dimulai pada kebersihan diri sendiri dan menuju pada kebersihan lingkungan rumah. Pengelompokan sampah dilakukan dari sumber sampah yang menghasilkan sampah.

5. Saluran air

Saluran air yang dapat berfungsi dengan baik, alirannya tidak tersumbat dan air berjalan lancar menjadi salah satu hal yang diperhatikan. Saluran air harus terbebas dari sampah agar tidak menimbulkan genangan yang dapat menyebabkan penyakit.

6. Pengolahan limbah yang baik

Pengelolaan limbah dapat dilakukan mulai dari lingkungan terkecil yaitu rumah. Setiap limbah harus diolah agar nantinya tidak membahayakan kehidupan..

Terkait dengan hal tersebut, menurut Arsana dkk maka prasarana persampahan (dalam Arsana dkk, 2018 : 107) adalah semua perlengkapan dan bangunan pendukung yang memiliki fungsi dalam melakukan pengelolaan sampah dimulai dari sumber timbulan sampah sampai pengolahan akhir. Terdapat beberapa panduan yang dapat dilaksanakan dalam prose pengumpulan sampah rumah tangga adalah sebagai berikut :

1. Kantong plastik

Dapat menggunakan kantong plastic yang berkapasitas diatara 7 sampai 10 liter yang mampu menampung timbulan sampah satu keluarga dengan maksimal anggota keluarga berjumlah 6 orang. Sistem pengumpulan dilakukan secara harian untuk menghindari penumpukan. Kantong plastik digunakan untuk sampah yang mudah busuk nantinya kantong dibuang sekaligus dengan sampah yang ada didalamnya. Keuntungan yang didapat dengan penggunaan plastik sebagai wadah sampah adalah mempermudah pembuangan setiap harinya dan terhindar dari bau. Namun terdapat hal negatif juga karena penggunaan kantong plastik menimbulkan sampah baru yang tidak dapat terurai.

2. Keranjang sampah plastik

Berbentuk wadah yang lumayan praktis yang dapat digunakan untuk pengumpulan sampah yang berbahan kering seperti kaca, gelas, kertas, kayu

dan sampah kering lainnya. Jika penggunaannya untuk sampah organik didalamnya juga perlu dialasi oleh bahan lain yang dapat menahan kadar air dari sampah basah tersebut.

3. Tong sampah

Tong sampah sebagai wadah memiliki sifat yang kurang praktis namun dapat bertahan lama. Biasanya wadah besar yang sudah tidak digunakan seperti drum dimanfaatkan sebagai tong sampah. Tong sampah dapat digunakan untuk menampung sampah jenis apapun.

4. Bak sampah

Dalam penggunaannya bak sampah harus di tutu dan juga tidak diletakkan di depan rumah. Bak sampah ini biasanya terbuat dari semen sehingga tidak fleksibel namun memiliki fungsi yang cukup bagus yang dapat bertahan lama.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 terdapat penilaian capaian kinerja di bidang pengolahan sampah. Penilaian capaian kinerja di bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dengan mempertimbangkan capaian-capaian yang diraih sehingga memperhatikan beberapa hal. Menurut pasal 20 Ayat 2 pencapaian kinerja dalam pengelolaan sampah dapat dinilai melalui :

- a. Lingkungan yang bersih.
- b. Sampah yang terolah.
- c. Tempat pemrosesan akhir beroperasi.

Salah satu contoh peraih adipura adalah Kota Semarang, dengan mendapatkan penghargaan enam kali berturut-turut sejak tahun 2012 hingga tahun 2017. Capaian yang telah disebutkan adalah hasil dari kerja keras dan komitmen bersama antar lembaga pemerintah. Kota Semarang sendiri telah memenuhi standar dari sejumlah penilaian seperti kebersihan dan penghijauan. Terdapat berbagai perubahan yang mendukung Kota Semarang untuk mendapatkan gelar kota yang bersih dan asri. Tahun berikutnya Kota Semarang gagal mendapatkan kembali penghargaan tersebut dikarenakan terdapat sapi di TPA Jatibarang. Sapi-sapi disekitaran TPA memakan sampah yang menumpuk sehingga penilaiannya berkurang. Tahun 2020 Kota Semarang menyandang gelar kota wisata terbersih di Asia Tenggara dalam ajang *ASEAN Tourism Forum (AFT)*. Pemerintah Kota Semarang menunjukkan kerja kerasnya dalam mewujudkan kota dengan lingkungan yang bersih.

1.4.4.2. Manajemen Perkotaan

Manajemen perkotaan (*Urban Management*) dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan sebagai rangkaian melaksanakan perencanaan suatu kota dalam pencapaian sasaran pembangunan. Tercapaiannya suatu tujuan melalui tepatnya tahapan yang dilakukan dan pelaksanaannya secara maksimal dan terpadu. Manajemen perkotaan menurut Richard E. Stren (dalam Fawahid, 2016 : 5), mencakup :

1. Pembangunan perkotaan yang meliputi wilayah dipertimbangkan oleh kelembagaan.

2. Sumberdaya keuangan daerah yang ditujukan untuk memperkuat desentralisasi menjadi pusat perhatian.
3. Pemusatan perhatian terhadap pilihan pengganti untuk mengatur dan membiayai pelayanan kota seperti transportasi, air bersih, kesehatan, sampah, listrik, dan lain sebagainya.
4. pencarian dan pemromosian adanya peran serta dari masyarakat dalam pelayanan infrastruktur kota yang dijadikan perhatian.

Menurut UNDP, kesejahteraan warga kota yang diartikan secara luas merupakan ruang lingkup dari manajemen perkotaan. Manajemen perkotaan memiliki tugas-tugas yang berhubungan dengan :

- a. Penyediaan fasilitas, pelayanan, dan infrastruktur perkotaan
- b. Perencanaan dan koordinasi perkembangan kota
- c. Peraturan

Manajemen kota memiliki dua pengertian yang berbeda dalam objeknya. Pertama, manajemen kota diperuntukkan sebagai manajemen terhadap kota dan wilayah sekitarnya yang merupakan suatu kesatuan dalam pengelolaannya. Yang kedua, manajemen dilihat sebagai dua objek yang berbeda yaitu sebagai manajemen wilayah dan manajemen kota. Pengelolaan suatu wilayah sangat kompleks dan juga rumit yang melibatkan berbagai sektor dan juga kerjasama. Pengelolaan perkotaan pada umumnya terbagi menjadi dua bidang yaitu :

1. Bidang Fisik

Merupakan segala sesuatu sumberdaya yang didalamnya termasuk pengelolaan infrastruktur. Penanganan sumberdaya alam yang memiliki pengaruh terhadap pembangunan kota juga masuk kedalam pengelolaann bidang fisik.

2. Bidang Non Fisik

Berkenaan dengan pengembangan kualitas sumberdaya manusia baik dari lembaga, ekonomi maupun kemasyarakatan serta pengawasan dan pengendalian pembangunan suatu wilayah.

Lea dan Courtney (dalam Nuh dan Suhartono, 2017 : 74) membedakan manajemen perkotaan menjadi dua, yaitu pendekatan orientasi permasalahan teknokratis dan pendekatan ekonomi politik struktural. Dalam pendekatan orientasi permasalahan teknokratis peningkatan kinerja terhadap instansi yang berperan dalam memecahkan permasalahan perkotaan lebih difokuskan. Yang kedua memfokuskan pada akar permasalahan yang di hadapi perkotaan pada situasi perkonomian, politik baik dalam ranah nasional maupun internasional. kedua pendekatan tersebut memiliki perbedaan yang dapat dilihat, namun jika kedua pendekatan dapat dilakukan bersama maka akan melengkapi satu sama lain dalam keberjalanannya. Lembaga-lembaga pemerintah dalam melaksanakan manajemen perkotaan harus menyelesaikan permasalahan di masyarakat agar mampu menghasilkan tata perkotaan yang ideal. Seladangkan Nick Devas dan Carole Rakodi (dalam Nurmadi, 2014 : 134) mengungkapkan penggunaan pendekatan yang berbeda, pendekatan yang dilakukan adalah menghubungkan antara manajemen perkotaan dari aspek ekonomi politik dengan aspek

perencanaan kota. Remy Proud'homme (dalam Nurmandi, 2014 : 138) yang merupakan pemerhati manajemen perkotaan menggunakan pendekatan manajerial, yang tidak mengelak dan menghindari analisis ekonomi politik. Konsep yang diajukan adalah koordinasi internal (*internal coordination*), koordinasi vertikal (*vertical coordination*), koordinasi horizontal (*horizontal koordinasi*).

Penggunaan konsep manajemen perkotaan memiliki cakupan yang cukup luas dan bersifat kompleks sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kota tersebut. Secara ideal, pemerintah kota menangani semua sektor yang saling memiliki kaitan yang dapat mempengaruhi pengelolaan perkotaan. Menurut Edward Leman (dalam Nurmandi. 2014 : 130) sektor-sektor utama manajemen perkotaan adalah lingkungan alam, lahan perkotaan, pelayanan sosial, infrastruktur, pembangunan ekonomi, serta perumahan dan fasilitas sosial. Model manajemen harus bersifat luwes artinya dapat mengikuti perubahan yang terjadi dengan menerapkan fungsi manajemen yang dinamis hal tersebut merupakan akibat dari keruwetan sektor yang mempengaruhi. Terdapat beberapa model-model manajemen perkotaan antara lain :

1. Model manajemen strategis (*strategic management*)

Dikembangkan guna mengantisipasi perkembangan kota yang bersifat pesat dan terus berubah Manajemen strategis mempunyai ciri-ciri:

- a. Misi dan dilai organisasi dirumuskan secara tegas dan jelas.
- b. Kekuatan dan kelemahan dalam lingkungan internal terlebih yang menyangkut sumberdaya serta kinerja mulai dikenalkan.

- c. Peluang tantangan dan ancaman dari lingkungan luar mulai dikenalkan berlanjut pada perumusan alternative untuk perkembangan organisasi.
 - d. Merumuskan adanya isu diantaranya adalah alternative dalam menjalankan, tidaklanjutnya dan juga program dalam menjalankannya.
 - e. Gambaran mengenai kinerja dalam suatu organisasi dimasa yang akan datang mulai dirumuskan.
2. Model manajemen dengan sasaran (*management by objectives*)
- a. Tujuan serta sasaran didefinisikan secara tegas, sederhana namun tetap jelas
 - b. Pendataan dan koordinasi antar sumberdaya yang tersedia dengan batas waktu
 - c. Melaksanakan pengorganisasian kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan.
3. Model PPBS (*Planning Programming and Budgeting System*)
- Model manajemen yang bertahap dan terstruktur dengan melibatkan kegiatan-kegiatan:
- a. Perencanaan yang bersifat hierarkis (*makro-mikro*), menyeluruh (*comprehensive*), dan terpadu (*integrated*)
 - b. Penyusunan program, misalnya untuk prasarana kota disusun suatu prioritas yang didasarkan pada kesesuaian terhadap aspek perencanaan
 - c. Penganggaran dari program yang telah ditetapkan yang meliputi kegiatan mobilisasi sumber daya (*revenue generation*) serta rencana pembiayaan (*expenditure plan*)

4. Model Manajemen Keunggulan kompetitif (*competitive advantage Management*)

Diasumsikan suatu kota dengan kota lainnya saling berkompetisi dalam mengelola pembangunan kota (*rivalry among urban areas*). Adanya distorsi dalam pasar sempurna yang menyebabkan titik temu atau titik singgung antar permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) jasa pelayanan kota sulit untuk diwujudkan.

Manajemen perkotaan meliputi pula kesejahteraan warga kota dalam arti yang luas. Didasarkan pada hal tersebut manajemen perkotaan melaksanakan fungsi dengan kegiatan meliputi pembangunan infrastruktur, menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan pelayanan, hal yang berkaitan dengan pengembangan perkotaan, peraturan dan lainnya yang memiliki hubungan dengan manajemen. Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam menjalankan manajemen suatu kota. Peran yang dilaksanakan adalah pengkoordinasian semua pihak yang berkaitan dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia dalam mewujudkan tujuan. Terdapat beberapa kriteria untuk mengevaluasi kinerja manajemen kota dalam Nick Devas and Carole Rakodi (dalam Wahyu. 2013) antara lain sebagai berikut :

1. Perbaiki standar hidup

Melakukan penganekaragaman sumberdaya yang sebelumnya hanya mencukupi kebutuhan konsumsi, saat ini juga harus melihat investasi yang dilakukan untuk memperbaiki produksi. Penyediaan barang dan jasa bagi konsumen antara satu sama lain berkompetisi secara sungguh-sungguh.

Penanganan sumberdaya yang ada dan digunakan harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis.

2. Pemerataan dan keadilan

Pendistribusian antara biaya dan manfaat harus dilakukan secara merata dengan memperhatikan kemampuan masing masing daerah. Prinsipnya keadilan tidak mengenal pembatasan dan juga pembedaan serta dalam pelaksanaannya harus memberikan kesamaan kesempatan bagi semua. Kesamaan penanganan bagi semua yang berhak memperoleh pelayanan juga merupakan salah satu artian dari keadilan. Walaupun demikian, harapan kepada mereka yang lebih kaya memberikan sumbangan lebih terhadap biaya pelayanan umum. Dalam hal ini masyarakat harus membayar sesuatu sesuai dengan apa yang telah diterima dan digunakan.

3. Sustainability lingkungan

Menggunakan sumberdaya yang dapat diperbaharui secara berkelanjutan. Meminimalisir penggunaan bahan yang langka maupun yang tidak dapat diperbaharui sebagai salah satu upaya menjaga kelangsungan lingkungan. meminimalisir kegiatan yang dapat memberikan pengaruh buruk pada lingkungan. Mengingat saat ini lingkungan juga perlu dijaga agar kelangsungan hidupnya dapat terus berjalan. Yang dapat dilakukan dengan hal-hal kecil yang akan memberikan dampak yang besar bagi lingkungan.

4. Memenuhi pertanggungjawaban terhadap hak asasi

Berbagai bentuk kebebasan yang diperbolehkan dan diatur dalam undang-undang harus terpenuhi. Kebebasan individu ataupun kelompok dengan

memperhatikan tanggung jawabnya masing-masing. Pemenuhan hak asasi tentunya harus diiringi dengan keseimbangan kewajiban yang harus dilaksanakan.

5. Pengimplementasian kebijakan, rencana, dan program

Kebijakan yang telah di susun dan direncanakan hendaknya diimplementasikan dengan baik. Melalui program-program yang tersusun untuk mencapai sasaran secara efektif. Dengan pemanfaatan sumberdaya dan organisasi yang dikelola secara terbuka.

6. Mengatasi konflik dan ketidakpastian

Konflik yang timbul diantara keadilan sosial dan mekanisme pasar dan juga permasalahan lain harus diatasi dengan baik agar tidak menimbulkan keretakan. Antara kekurangan kelengkapan data harus diperhatikan agar proses analisisnya menjadi lebih pasti.

Di dalam pelaksanaan manajemen perkotaan tentunya diperlukan pula sarana dan prasarana yang baik. Menurut Kodoatie (Arsana dkk, 2018 : 106) infrastruktur atau prasarana merupakan hal utama dalam mendukung fungsi dan sistem yang ada dimasyarakat. Infrastruktur sendiri merupakan fasilitas berbentuk fisik yang dipergunakan untuk kelangsungan sistem kemasyarakatan yang mewadai interaksi antara lingkungan dengan masyarakat.

Manajemen perkotaan sebagai salah satu upaya melaksanakan perencanaan kota dalam pencapaian sasaran yang diinginkan, sehingga mewujudkan lingkungan yang lebih sehat dan bersih. Manajemen perkotaan merupakan rangkaian dari perencanaan perkotaan yang mengatur berbagai aspek dalam

pembangunan kota. Manajemen perkotaan dilakukan agar pembangunan dilakukan lebih sistematis dan terorganisir dengan baik, sehingga dapat melihat berbagai aspek dalam kehidupan. Tidak luput juga memandang kesejahteraan warganya dalam mengambil tindakan. Manajemen kota dilakukan agar tercapainya pembangunan kota yang efektif dan efisien.

1.4.5. Efektivitas

Efektivitas menyatakan kapasitas suatu organisasi dalam meraih sasaran yang sudah ditetapkan. Memperhatikan efektivitas pemanfaatan dalam organisasi dapat menghasilkan target atau hasil akhir yang diinginkan sesuai dengan rancangan awal baik waktu maupun prosedurnya. Menurut Gibson (dalam Annas, 2017 : 76), melihat organisasi efektif atau tidak dengan tiga perspektif yaitu keefektifan individu, keefektifan kelompok dan keefektifan organisasi.

1. Efektivitas Individu

Menekankan pada tugas dan juga tanggung jawab individu yang bekerja dalam suatu organisasi. Berkaitan erat dengan bagaimana ia dapat bekerja dengan orang lain dikarenakan organisasi tidak hanya bekerja dengan dirinya sendiri. Jika hal tersebut dapat dilakukan dengan baik maka prestasi dalam pekerjaan juga baik.

2. Efektivitas Kelompok

Pekerjaan dapat diberikan kepada kelompok pekerja. Dengan tugas yang diberikan tersebut harus terselesaikan secara berkelompok bukan oleh individu atau perorangan.

3. Efektivitas Organisasi

Hasil dari efektivitas individu dan juga kelompok. Dalam efektivitas organisasi ini dapat melebihi jumlah dari masing-masing efektivitas sebelumnya. Mengkaitkan semua aspek yang ada pada organisasi agar dapat tercapai efektivitas.

Penelitian ini akan membahas mengenai efektivitas organisasi, suatu organisasi tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai. Keberhasilan sebuah organisasi dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan telah tercapai atau yang telah dirumuskan dan ditentukan. Efektivitas organisasi dapat diartikan sebagai salah satu tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Pengertian efektivitas organisasi banyak dilontarkan oleh para ahli, Balduck dan Buelens (dalam Kadok, 2018 : 27) menyebutkan salah satu ukuran keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan adalah efektivitas. Menurut Robbins (dalam Darwis dkk, 2017 : 14) tingkat pencapaian dalam jangka waktu singkat ataupun panjang merupakan perwujudan efektivitas. Lawler (dalam Kadok, 2018 : 27) akuntabilitas dan pencapaian program yang ditetapkan merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas. Penekanan pada pencapaian sasaran dan tujuan yang sesuai dengan apa yang sejalan dengan organisasi. Pencapaian tersebut merefleksikan pemimpin bahwa apa yang dijanjikan telah terlaksanakan. Schein (dalam Darwis dkk, 2017 : 14) menyebutkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dan bertahan merupakan efektivitas.

Pemahaman yang dipaparkan oleh para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas merupakan salah satu perlengkapan yang dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan disuatu organisasi dalam menjalankan keberlangsungannya, dengan melihat ketercapaian tujuan dan juga sasaran berdasarkan apa yang telah disusun dan terencana sebelumnya. Dapat dikatakan pula bahwa efektivitas merupakan pengukuran dari tercapainya tujuan. Tingkat efektivitas organisasi menunjukkan pada seberapa jauh suatu organisasi melakukan kegiatan dalam menjalankan tugas dan juga fungsinya sehingga tujuannya dapat dicapai secara optimal

Terdapat beberapa Faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas organisasi (dalam Watiah. 2011 : 10) adalah sebagai berikut :

a) Adanya kejelasan tujuan

Organisasi yang baik pastinya memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Tujuan yang jelas mempermudah dalam setiap pekerjaan yang dilaksanakan. Selain itu juga akan memberikan motivasi dalam melaksanakan tugas secara bertanggung jawab. Kejelasan ini mengarahkan organisasi dalam melaksanakan apa yang menjadi keinginannya.

b) Struktur organisasi

Struktur merupakan suatu rangkaian yang sistematis, dengan adanya struktur maka dalam menjalankan organisasi akan lebih mudah. Efektivitas juga dipengaruhi oleh adanya struktur dalam organisasi. Struktur yang sederhana namun kaya akan fungsi merupakan contoh struktur yang baik.

c) Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat

Efektifitas akan berjalan dan terwujud jika terdapat dukungan dan partisipasi dari lingkungan sekitarnya atau masyarakat.

d) Memiliki sistem nilai yang dianut

Sistem nilai yang baik tentunya akan mempengaruhi keefektifitasan suatu organisasi.

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas organisasi dalam mencapai kerja maksimal, selain lingkungan kerja internal organisasi, faktor penyebab lainnya adalah motivasi, keahlian manajerial dan sinergi tim yang kreatif. Di samping itu faktor pelatihan dan pengembangan dan penghargaan kerja juga dipandang penting dalam pencapaian efektivitas organisasi. Faktor-faktor internal organisasi yang menyangkut pengelolaan jalannya proses kinerja dipandang perlu mendapatkan perhatian, keahlian mengelola, dukungan terhadap karyawan dan lingkungan kerja berdampak sangat kuat dalam jalannya proses kerja guna mencapai efektivitas. Richard M Steers (dalam Watiah. 2011 : 12) mengungkapkan bahwa efektivitas dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

a. Karakteristik organisasi

Setiap organisasi tentunya memiliki hal yang berbeda antara satu sama lain. Dalam organisasi untuk menjalankannya terdapat susunan sumberdaya manusia. Struktur organisasi dibentuk untuk menetapkan posisi sumberdaya manusia yang didalamnya terdapat hierarki. Penempatan setiap masing-masing individu disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan organisasi. Penempatan ini menentukan pembagian kerja dan juga pola interaksi.

b. Karakteristik lingkungan

Karakteristik lingkungan yang dimaksud adalah hal yang dapat mempengaruhi organisasi. Terdapat dua sudut pandang dalam karakteristik lingkungan organisasi yaitu lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal merupakan keadaan yang ada didalam organisasi itu sendiri, biasanya menyangkut budaya organisasi. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan lingkungan luar organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi. Lingkungan eksternal juga tidak kalah penting untuk diperhatikan karena mempengaruhi organisasi terutama saat pembuatan keputusan dan tindakan.

c. Karakteristik pekerja

Sumberdaya manusia merupakan hal pokok yang harus ada pada setiap organisasi. Memiliki pengaruh yang cukup besar dalam efektivitas organisasi. Setiap orang tentunya memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda antara satu sama lain. Perbedaan tersebut yang harus disadari oleh masing-masing pekerja sehingga dapat melakukan pekerjaannya secara efektif. Dalam keberhasilan organisasi harus menyelaraskan sumberdaya manusia dengan tujuan organisasi.

d. Karakteristik manajemen

Perancangan semua kebutuhan dari organisasi harus dilakukan untuk pencapaian semua gagasan. Pembentukan kebijakan dan juga mempraktekkan manajemen dilaksanakan dalam pencapaian tujuan. Mekanisme pekerjaan disusun sedemikian rupa yang disesuaikan dengan organisasi tersebut. Dalam pelaksanaannya manajemen mengatur banyak hal mulai dari bagaimana tujuan

yang hendak dicapai, sumberdaya manusianya, lingkungan, kepemimpinannya dan lain sebagainya yang berhubungan dengan organisasi.

Berhasilnya efektivitas organisasi perlu dinilai pada periode tertentu, beraneka macam model pendekatan dipaparkan oleh para ahli terkait dengan pelaksanaan penilaian efektivitas organisasi dan pengukurannya. Menurut Balduck dan Buelens (dalam Kadek, 2018 : 29), mengklasifikasikan empat pendekatan kunci yang dapat digunakan sebagai tolak ukur suatu organisasi dikatakan efektif atau tidak, yaitu :

1. Pendekatan tujuan (*the goal approach*) merupakan pendekatan yang dapat dipergunakan secara luas. Pendekatan ini beranggapan bahwa organisasi ada untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Penekanan pada peran serta yang dipusatkan dari tercapainya tujuan sebagai parameter dalam menilai efektivitas. Memfokuskan pada hasil akhir yang tercapai untuk mengetahui tujuan operasional seperti inovasi, kualitas produk, dan keuntungan.
2. Pendekatan sistem (*the system resources approach*) menjelaskan efektivitas dari perspektif kapasitasnya dalam mendapatkan sumberdaya yang menjadi kebutuhan dengan mencari dari lingkungan eksternal. Penekanan pada elemen dasar yaitu masukan-proses-pengeluaran dengan beradaptasi pada lingkungan yang mendukung organisasi. Sistem yang diterapkan dapat berjalan secara efektif apabila barang dan jasa yang direncanakan beriringan dengan sumberdaya yang masuk dan disesuaikan.
3. Pendekatan proses internal (*the internal process approach*) pendekatan yang mencermati adanya perubahan di dalam organisasi, untuk memandang

penggunaan sumberdaya dalam memberikan pelayanan atau dalam menghasilkan barang. Bertujuan untuk melihat bahwa secara internal organisasi dianggap sehat serta efisien dengan menjalankan prosedur secara optimal. Sesama anggota menjalin hubungan berdasarkan pada rasa percaya, kebaikan, dan kejujuran. Dalam pendekatan ini komunikasi dan manajemen informasi sangat penting, mengingat informasi terjadi dalam segala arah.

4. Pendekatan Statejik (*the strategic constituency approach*) berhubungan dengan pengaruh organisasi yang berkenaan dengan orang yang memiliki kepentingan. Melihat semua yang berhubungan dengan organisasi dan juga memperhatikan kepuasan semua unsur kepentingan. Mengevaluasi faktor yang terkait dengan lingkungan eksternal dan internal organisasi.

Sementara itu, Azar Kasim (dalam Watiah. 2011 : 13) mengemukakan metode yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur efektivitas yaitu:

1. Model sistem rasional, produktivitas serta efisiensi ditekankan pada sistem ini.
2. Model sistem alamiah, menitik beratkan pada sumberdaya manusianya yaitu keseragaman dan nilai moral.
3. Model sistem terbuka, mendapatkan sumberdaya dan memiliki kemampuan menyesuaikan diri berkenaan dengan lingkungannya.

Pendekatan yang sering digunakan dalam pengukuran efektivitas ini adalah pendekatan sasaran. Dengan mempertimbangkan tujuan yang hendak dicapai suatu organisasi. Tujuan tersebut dilaksanakan tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Cakupannya juga mengenai sasaran secara keseluruhan maupun bagian tertentu dalam suatu organisasi. Pada pendekatan sasaran ini

efektivitas organisasi di ukur berdasarkan pencapaian akhir. Selain pendekatan sasaran ini penggunaan pendekatan lainnya juga tidak menjadi masalah. Penyesuaian dengan organisasi yang akan dinilai efektivitasnya juga perlu diperhatikan agar hasilnya menjadi lebih jelas. Pengukuran dan penilaian terhadap efektivitas dilihat dengan berbagai aspek. Robbins (dalam Gammahendra dkk, 2014 : 4) mengatakan bahwa efektivitas dalam organisasi merupakan tahapan-tahapan yang tercapai dipengaruhi oleh sumberdaya manusia secara individu, kelompok, serta sstruktur dalam organisai.

Duncan (dalam Sabrina, 2014 : 4) menyampaikan pendapatnya tentang beberapa ukuran efektivitas, diantaranya yaitu:

1. Pencapaian Tujuan

Upaya-upaya dalam mencapai suatu tujuan dipandang sebagai proses. Proses tersebut tentunya memiliki tahapan-tahapan yang sistematis sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana dengan baik. Tahapan harus dilaksanakan dengan baik dengan memperhatikan aspek penting dalam organisasi. Tercapainya tujuan sendiri meliputi dua hal yaitu sasaran dengan target yang nyata dan juga kurun waktu dalam pelaksanaannya.

2. Adaptasi

Penyesuaian diri yang dilakukan kepada lingkungan. lingkungan bisa berupa kapan saja sehingga penyesuaian harus dilakukan. Lingkungan yang seperti apa yang dibangun dan juga lingkungan luar yang seperti apa diperhatikan dengan cermat. Tolok ukur yang digunakan adalah pengadaan dan pengisian tenaga kerja..

3. Integrasi

Suatu organisasi mampu mengadakan komunikasi yang baik, sosialisasi, pengembangan kesepakatan dalam organisasi tersebut maupun dengan organisasi lain. Menyangkut adanya interaksi dan sosialisasi yang dibentuk.

Efektif atau tidaknya suatu tujuan dapat dilihat dengan berbagai kriteria atau pengukuran, Gibson (dalam Annas, 2017 : 76) menyebutkan beberapa kriteria tersebut yaitu:

- a. Jelasnya tujuan yang ingin dicapai, setiap organisasi tentunya memiliki tujuan. Tujuan yang dibentuk harus jelas yang berguna untuk mempermudah karyawan ataupun pegawai dalam melaksanakan tugas sehingga sasaran tercapai secara terarah, hal tersebut dapat menunjang keberhasilan tujuan yang telah disusun.
- b. Strategi dalam pencapaian tujuan harus jelas, strategi merupakan jalan yang ditempuh dalam pencapaian tujuan. Upaya yang dilakukan agar pencapaian tujuan sesuai, sehingga pelaksanaannya tidak tersesat.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, pengumpulan data yang nyata dipergunakan dalam proses perumusan. Dijalankannya analisis terhadap tujuan dan strategi sehingga kebijakan yang terbentuk dapat menjembatani tujuan dengan usaha melaksanakan kegiatannya.
- d. Perencanaan yang matang, perencanaan merupakan perumusan apa yang harus dikerjakan baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang.

e. Menyusun program yang tepat, dari suatu rencana harus dijabarkan dalam program-program pelaksanaan. Ketepatan dalam pemilihan program ini penting, jika tidak tepat pekerja kurang memiliki pedoman dalam bertindak.

f. Sarana dan prasarana yang memadai, organisasi dapat bekerja dengan produktif dan efektif apabila sarana dan prasarana terpenuhi dengan baik. Penyediaan sarana dan prasarana mempengaruhi kinerja organisasi.

g. Efisiensi dalam pelaksanaan, program harus dilaksanakan dengan efisien melihat apa yang dikeluarkan dan apa yang akan didapat. Program yang baik dan tepat juga harus memperhatikan *feed back* untuk organisasi.

h. Adanya pengawasan dan pengendalian, dalam pelaksanaannya harus ada pengawasan. Pengawasan dilakukan agar dapat memperbaiki jika ada kesalahan dan mempertahankan apa yang dianggap baik dan sesuai.

Pencapaian efektivitas organisasi tentunya harus beriringan dengan manajemen yang baik. Manajemen dibutuhkan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Organisasi harus melaksanakan proses manajemen dengan baik agar dapat mencapai tujuan tersebut dengan efektif. Proses merupakan cara sistematis dalam melakukan pekerjaan, proses manajemen yang perlu diterapkan dalam organisasi adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Semua tahap-tahap manajemen tersebut harus terlaksana dengan baik agar efektivitas dapat tercapai. Begitu pula ketika menjalankan suatu program dalam pelaksanaan manajemen perkotaan untuk memperhatikan unsur-unsur yang terkandung dalam manajemen.

1.5. Fenomena Penelitian

Efektivitas merupakan suatu pengukuran terhadap sasaran-sasaran atau target yang telah ditentukan oleh organisasi. Target ataupun sasaran tersebut menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam melihat keefektifitasan suatu kegiatan. Tujuan dari organisasi tersebut dan kegiatan yang dilaksanakan tentunya harus disusun terlebih dahulu sehingga terdapat suatu acuan yang sesuai. Hal ini tentunya melibatkan proses manajemen dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Masing-masing dari unsur manajemen tersebut memiliki perannya masing-masing yang tentunya melengkapi satu sama lain. Dengan penerapan manajemen tersebut diharapkan akan lebih memperkuat dan mempermudah suatu organisasi dalam menentukan tujuan, sasaran dan target. Proses pengawasan yang nantinya akan dilanjutkan dengan evaluasi yang menjadikan salah satu kacamata dalam melihat efektif atau tidak suatu program atau kegiatan dilaksanakan. Kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak :

1. Jelasnya tujuan yang ingin dicapai, setiap organisasi tentunya memiliki tujuan. Tujuan yang dibentuk harus jelas yang berguna untuk mempermudah karyawan ataupun pegawai dalam melaksanakan tugas sehingga sasaran tercapai secara terarah, hal tersebut dapat menunjang keberhasilan tujuan tadi.
2. Strategi dalam pencapaian tujuan harus jelas, strategi merupakan jalan yang ditempuh dalam pencapaian tujuan. Upaya yang dilakukan agar pencapaian tujuan sesuai, sehingga pelaksanaannya tidak tersesat.

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, pengumpulan data yang nyata dipergunakan dalam proses perumusan. Dijalankannya analisis terhadap tujuan dan strategi sehingga kebijakan yang terbentuk dapat menjembatani tujuan dengan usaha melaksanakan kegiatannya.
4. Perencanaan yang matang, perencanaan merupakan perumusan apa yang harus dikerjakan baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang.
5. Menyusun program yang tepat, dari suatu rencana harus dijabarkan dalam program-program pelaksanaan. Ketepatan dalam pemilihan program ini penting, jika tidak tepat pekerja kurang memiliki pedoman dalam bertindak.
6. Sarana dan prasarana yang memadai, organisasi dapat bekerja dengan produktif dan efektif apabila sarana dan prasarana terpenuhi dengan baik. Penyediaan sarana dan prasarana mempengaruhi kinerja organisasi.
7. Efisiensi dalam pelaksanaan, program harus dilaksanakan dengan efisien melihat apa yang dikeluarkan dan apa yang akan didapat. Program yang baik dan tepat juga harus memperhatikan *feed back* untuk organisasi.
8. Adanya pengawasan dan pengendalian, dalam pelaksanaannya harus ada pengawasan. Pengawasan dilakukan agar dapat memperbaiki jika ada kesalahan dan mempertahankan apa yang dianggap baik dan sesuai.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Denzin dan Lincoln (dalam Anggito, Setiawan, 2018 :7) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempergunakan latar alamiah dengan maksud

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dengan menguraikan fenomena yang terjadi yang menjadi instrument kunci.

Objek yang diteliti merupakan objek yang alamiah dengan latar yang alamiah pula, dengan peneliti merupakan instrument kunci, pengumpulan data dilakukan dengan cara menggabungkan (triangulasi), data dianalisis secara kualitatif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna. Peneliti pertama kali melihat objek yang akan diteliti kemudian melihat segala sesuatu yang berkaitan dengan objek. Peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, dirasakan, didengar, dan diperoleh. Selanjutnya peneliti memfokuskan informasi-informasi yang didapatkan sebelumnya. Tahap ketiga penelitian ini adalah tahap seleksi. Informasi yang didapat akan diuraikan sehingga menjadi lebih rinci. Penelitian kualitatif memiliki hasil akhir berupa data atau informasi yang bermakna.

1.6.2. Situs Penelitian

Situs penelitian yang dijadikan objek peneliti adalah TPA Jatibarang. Tempat pemrosesan akhir (TPA) Jatibarang merupakan satu-satunya TPA yang dimiliki oleh Kota Semarang. Berada di kecamatan Mijen tepatnya Kelurahan Kedungpane sebelah barat daya Kota Semarang. Luas dari TPA sendiri adalah 46,183 Ha, lahan TPA tersebut milik Pemerintah Kota Semarang. Kondisi yang terlihat adalah adanya pembagian lahan yang cukup jelas pada TPA sesuai fungsinya.

Dengan lahan yang tidak rata ketinggiannya, bagian paling bawah digunakan sebagai kolam limbah.

1.6.3. Populasi dan Sampel

Populasi tidak di pergunakan dalam penelitian kualitatif. tetapi oleh Spradley (dalam Sugiyono, 2011 : 215) dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial terdiri atas tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Objek penelitian diamati secara mendalam yang didalamnya meliputi aktivitas manusia yang berada pada tempat tertentu. Populasi tidak dipergunakan dalam penelitian kualitatif, dikarenakan pada penelitian kualitatif beranjak dari adanya kasus tertentu dan pada situasi tertentu dan hasil kajian populasi tidak berlaku. Sedangkan sampel pada pada penelitian kualitatif dinamakan narasumber atau informan bukan responden.

Peneliti menggunakan teknik sampling *purposive sampling*, dimana peneliti menentukan informan sesuai dengan kriteria dan tujuan dari penelitian. Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah staf bidang pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup, kepala UPTD TPA Jatibarang, dan pegawai operasional timbangan di TPA Jatibarang.

Teknik dalam pengambilan sampel ssering disebut juga teknik sampling. Diperuntukkan dalam penentuan sampel yang nantinya akan dipergunakan dari berbagai teknik yang ada. Teknik sampling yang akan dipergunakan adalah *non-probability sampling*. *Non-probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang didalam pelaksanaannya memberikan kesempatan yang tidak sama

bagi setiap anggota dalam populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Peneliti akan menggunakan teknik sampling, *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

1.6.4. Instrument Penelitian

Peneliti pada penelitian kualitatif adalah alat penelitian atau instrument dari penelitian itu sendiri. Peneliti sebagai instrument penelitian memiliki tugas dalam penentuan fokus penelitian, pemilihan informan yang akan menjadi sumber data, mengumpulkan data, menganalisis data dan menyimpulkan data-data yang diperoleh. Di dalam penelitian kualitatif instrument yang penting adalah peneliti itu sendiri, namun dalam keberlanjutannya setelah fokus dalam penelitian lebih jelas dapat mengembangkan instrument dasar dalam penelitian.

1.6.5. Sumber Data

Dalam penelitian sumber data sendiri diklasifikasikan menjadi dua primer dan sekunder. Data yang diperoleh oleh peneliti dari pemberi data atau informan merupakan sumber data primer. Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung seperti melalui perantara. Peneliti mendapatkan data berupa data primer dari wawancara dan juga data sekunder dari dokumen-dokumen yang ditemukan.

1.6.6. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dilakukannya penelitian adalah mendapatkan data yang diinginkan, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan penentuan teknik pengumpulan data. Penghimpunan data ini dapat dilaksanakan dengan berbagai perspektif. Jika yang

dilihat latar atau lingkungannya maka latarnya adalah alamiah. Yang kedua bila melihat sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer maupun sekunder. Selain itu pengumpulan data juga dapat dilakukan dengan cara yang lain seperti penyebaran kuesioner, melakukan wawancara, dokumen, dan melakukan observasi atau bahkan pengabungan antara keempat hal tersebut. Peneliti mendapatkan data dari informan dengan sumber primer dan sekunder yaitu dengan wawancara dan pengumpulan data dengan dokumen.

Pengumpulan data yang memerlukan studi pendahulu untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dapat menggunakan wawancara. Peneliti juga mendapatkan informasi yang lebih mendalam dengan penerapan teknik ini. Pada penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-struktur, wawancara jenis ini dapat masuk dalam kategori *in-dept interview*. Pelaksanaan pada wawancara ini bisa dikatakan lebih bebas dari pada wawancara yang terstruktur. Tujuannya adalah mendapatkan masalah-masalah lebih terbuka sehingga lebih jelas. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara saksama oleh peneliti dengan mencatat dan juga merekam informasi yang disampaikan informan.

Catatan suatu peristiwa ataupun kegiatan yang sudah dilakukan adalah dokumen. Dokumen sendiri dapat berupa karya yang berbentuk gambar maupun tulisan yang bersifat masa lampau dari seseorang maupun kelompok. Penelitian yang dilakukan dengan wawancara akan lebih dipercaya jika disertai dengan adanya dokumen yang diambil datanya.

1.6.7. Analisis dan Interpretasi Data

Proses pencarian dan juga penyusunan data yang sistematis yang didapatkan dari hasil catatan lapangan, wawancara dan juga lainnya. Dengan demikian maka akan lebih mudah ditemukan dipahami dan selanjutnya diinformasikan kepada orang lain. Penganalisisan data dilakukan dengan mengatur data, yang kemudian dijabarkan kedalam unsur yang lebih detail, pemilihan data apakah penting atau tidak dan akhirnya dapat disimpulkan.

Penelitian ini dilakukan dari pengumpulan, pengolahan, yang dianalisis serta disajikan secara sistematis. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendapatkan deskripsi atau penjelasan dari suatu fenomena penelitian.